

# EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Sultan Caesar  
NPP. 31.0034

*Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : [sultancaesar4@gmail.com](mailto:sultancaesar4@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Nur Ichsan Amin, SH, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP) :** *Poverty control program is an effort made by the government to design and implement policies, programs, and actions aimed at reducing the number of people living below the poverty line. There are two poverty control programs run by the Langsa City Social Service, namely the Family Hope Program (PKH) and the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). The Family Hope Program in its implementation has been regulated in Permensos No. 1 of 2018, while the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has been regulated in Permensos No. 20 of 2019. In conducting evaluation activities, the author obtained several findings of problems with optimizing the implementation of the two programs, such as budget limitations, the BPNT implementation format that is not in accordance with procedures, the lack of competence of program implementing staff, the data input system for the poor that is not up to date, and the attitude of the community that is less supportive.* **Purpose :** *The purpose of this study is to determine the evaluation of the poverty control program in Langsa City, as well as the efforts made by the Social Service in the future in optimizing the implementation of the program.* **Methods:** *The research method used is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of this study is to use Daniel Stufflebeam's theory, namely Context, Input, Process, Product.* **Results/Findings :** *Based on the results of the evaluation research conducted by the researcher, several significant problems were found, as well as obstacles in the technical implementation of PKH and BPNT. Efforts made by the Langsa City Social Service in the future in optimizing the implementation of PKH and BPNT in Langsa City include several steps. First, taking an inclusive approach to the community so that assistance is used optimally. Second, planning to change the BPNT format from cash assistance to basic necessities to prevent misuse and ensure that assistance meets basic needs. Third, evaluating the data input system for the poor to ensure that the program is right on target and effective. Fourth, utilizing existing program support facilities and committing to improving the lack of facilities in order to support the implementation of the program efficiently. Fifth, getting support from the Langsa City Government to provide competency development training for PKH and BPNT implementers to improve the quality of program implementation and services to the community.* **Conclusion :** *From the evaluation activities carried out by the author by referring to existing theories, the author concludes that the Implementation of the Poverty Control Program in Langsa City is not optimal, there are still several obstacles such as inappropriate implementation*

*procedures, competencies that are not possessed by the implementers, limited budget, and facilities and infrastructure that do not support.*

**Keywords :** *Evaluation, Poverty Control Program, Decreasing Poverty Rate*

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Program pengendalian kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program, serta tindakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ada dua program pengendalian kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Langsa yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018, sedangkan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diatur dalam Permensos No. 20 Tahun 2019. Dalam melakukan kegiatan evaluasi, penulis memperoleh beberapa temuan masalah terhadap optimalisasi pelaksanaan kedua program tersebut, seperti keterbatasan anggaran, format pelaksanaan BPNT yang tidak sesuai prosedur, kurangnya kompetensi staff pelaksana program, sistem penginputan data masyarakat miskin yang belum termutakhir, serta sikap masyarakat yang kurang mendukung. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kedepannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, obserbvasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Daniel Stufflebeam yaitu *Context, Input, Process, Product*. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan hasil penelitian evaluasi yang dilakukan peneliti, ditemukannya beberapa masalah yang cukup signifikan, serta hambatan dalam pelaksanaan teknis PKH dan BPNT. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota langsa kedepannya dalam optimalisasi pelaksanaan PKH dan BPNT di Kota Langsa meliputi beberapa langkah. Pertama, melakukan pendekatan inklusif kepada masyarakat agar bantuan digunakan secara optimal. Kedua, merencanakan perubahan format BPNT dari bantuan tunai menjadi sembako untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, mengevaluasi sistem penginputan data masyarakat miskin untuk memastikan program tepat sasaran dan efektif. Keempat, memanfaatkan fasilitas pendukung program yang ada serta berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan fasilitas guna mendukung pelaksanaan program secara efisien. Kelima, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Langsa untuk menyediakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi pelaksana PKH dan BPNT untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. **Kesimpulan :** Dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh penulis dengan mempedomani teori yanag ada, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa belum optimal, masih terdapat beberapa hambatan seperti ketidaksesuain prosedur pelaksanaan, kompetensi yang tidak dimiliki para pelaksana, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

**Kata Kunci :** **Evaluasi, Program Pengendalian Kemiskinan, Menurunnya Angka Kemiskinan**



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah kemiskinan (Zulkarnaini, 2023). Meskipun Aceh memiliki potensi sumber daya yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, dan sektor pertanian yang subur, tetapi provinsi ini juga menghadapi berbagai masalah yang berdampak pada tingkat kemiskinan penduduknya. Ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di Aceh seperti, pada sejarah konflik bersenjata di Aceh, bencana alam, keterbatasan infrastruktur, hingga pandemi Covid-19. Sehingga dari faktor-faktor ini Aceh memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemulihan ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur.

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang masih menghadapi masalah sosial maupun ekonomi. Didalamnya masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kondisi kehidupan yang sulit dan berada dalam tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, berbagai upaya dari pemerintah terus dilakukan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa. Berikut merupakan data tabel terkait dengan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Langsa :

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Langsa, 2019-2022**

<b>Tahun year</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of poor people</i></b>	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>	<b>Indeks Keparahan Kemiskinan</b>
2019	10,57	1,78	0,44
2020	10,44	1,60	0,36
2021	10,96	1,53	0,33
2022	10,62	2,17	0,60

Sumber : BPS Kota Langsa, (2023)

Jika dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Langsa, persentase penduduk miskin sampai tahun terakhir yaitu tahun 2022, mengalami fluktuasi dengan didominasi oleh besarnya peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2018 hingga 2020 persentase penduduk miskin di Kota Langsa masih bisa dikatakan stabil dengan selisih yang tidak terlalu jauh, namun kemudian

di tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan terpengaruhnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Program pengendalian kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program, serta tindakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada intinya, program ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian, program ini juga merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan BPS Kota Langsa, (2023) ada dua jenis bantuan pemerintah yang umumnya ditujukan kepada masyarakat yang tergolong miskin di Kota Langsa yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program bantuan sosial dengan memberikan paket sembako atau bahan pangan pokok kepada masyarakat kurang mampu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program perlindungan sosial dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam peraturan ini, dijelaskan tentang mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima manfaat, kewajiban penerima manfaat, serta peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH. Program ini mengharuskan penerima manfaat untuk memenuhi syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk non-tunai. Bantuan ini diberikan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong (warung elektronik) yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Peraturan ini menetapkan mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima, tata cara penggunaan bantuan, serta pemantauan dan evaluasi program. Tujuan utama BPNT adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pangan.



Kedua program bantuan ini diharapkan mampu berperan dan berkontribusi dalam upaya mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Langsa. Namun dari data kemiskinan yang telah disajikan diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dan tujuan dari beberapa program yang telah dikerahkan oleh pemerintah dalam mengendalikan kemiskinan di Kota Langsa belum dapat tercapai secara maksimal.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menghadapi berbagai tantangan yang ditemukan peneliti. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala utama yang menghambat optimalisasi program ini. Selain itu, format pelaksanaan BPNT sering kali tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi efektivitas distribusi bantuan. Kurangnya kompetensi staf pelaksana program juga menjadi masalah serius, karena mereka tidak selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini diperparah oleh sistem penginputan data masyarakat miskin yang belum termutakhirkan, menyebabkan data yang digunakan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi terkini. Sikap masyarakat yang kurang mendukung program juga menjadi tantangan tersendiri, karena partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks evaluasi, efektivitas maupun implementasi pada pelaksanaan program pengendalian kemiskinan. Penelitian R.Retno dan Indraddin, berjudul Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Studi di Nagari Sungai Pinang (R.Retno & Indraddin, 2022), menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang belum dapat dikatakan efektif. Penelitian Belasari dkk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan program ini, kecamatan tersebut mengalami perubahan yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya (Belasari dkk., 2022). Penelitian Yanila menunjukkan bahwa Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya berjalan efektif berdasarkan dari teori yang digunakan penulis (Yanila, 2022). Penelitian Dwita Agustina dan Suci Megawati menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat dianggap telah optimal karena latar belakang pembuatannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Agustina & Megawati, 2022). Kemudian untuk penelitian Felinda dkk menunjukkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padalarang belum efektif. Dapat dilihat dari belum optimalnya penyaluran dana PKH, serta program ini belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin (Felinda dkk., 2020).

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan dari penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan tidak hanya satu program pengendalian kemiskinan saja, melainkan mengevaluasi setiap program pengendalian kemiskinan di Dinas Sosial Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Daniel Stufflebeam yang ada pada buku *Evaluation Theory, Models, And Applications* (2014), dengan model CIPP nya yakni konteks, input, proses, dan produk.

#### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Langsa dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, terutama pada program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Langsa. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitas program dalam mencapai tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampaknya terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa. Menurut Jones dalam Ali dan Masrich (2017), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dan spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya, serta metode analisisnya. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang ada, sehingga dapat mengusulkan perbaikan dan pengembangan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, desain dari penelitian ini dipilih sebab lebih tepat dalam mendeskripsikan evaluasi terkait dengan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus multimode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan dalam bentuk naratif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penyelidikan empiris yang sistematis terhadap suatu makna (Shank dalam Muri Yusuf, 2014).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan guna untuk menganalisis data yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian naratif mengenai gambaran maupun situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan dengan menekankan pada proses dan makna dari masalah. Kajian ini secara sistematis mengintegrasikan, mengolah dan menganalisis



terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai Evaluasi Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Sekretaris Dinas Sosial Kota Langsa, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Langsa, Koordinator Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Langsa, Pendamping PKH Kota Langsa, Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) Kota Langsa, serta Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) di Kota Langsa sebanyak 6 orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa Provinsi Aceh menggunakan pendapat dari Daniel Stufflebeam dalam bukunya *Evaluation Theory, Models, And Applications* (2014) dengan model CIPP yang dikemukakanya yakni *Context, Input, Process, Product*. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **Evaluasi Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa**

##### **3.1 Konteks**

Program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program PKH dan BPNT, menghadapi tantangan terkait kebutuhan yang belum terpenuhi sejak tahun 2022, seperti fasilitas yang kurang memadai dan kekurangan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, yang secara langsung mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia, serta memperkuat upaya sosialisasi yang inklusif dan konsisten kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dengan baik dan memanfaatkan program PKH dan BPNT secara optimal. Melibatkan stakeholder lokal dan mendengarkan umpan balik dari lapangan juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program ini, sehingga bantuan yang diberikan dapat benar-benar mencapai sasaran dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Langsa.

##### **3.2 Input**

Pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa melibatkan berbagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia (SDM) untuk program PKH dan BPNT sudah cukup memadai sesuai kebutuhan. Namun, terjadi penurunan signifikan dalam anggaran finansial untuk kedua program tersebut. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kota Langsa tetap bertekad untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia demi kepentingan masyarakat. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program belum terpenuhi dengan baik, sehingga menghambat optimalisasi kinerja program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa.

### 3.3 Proses

Pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, khususnya PKH dan BPNT, memiliki mekanisme yang diatur oleh Permensos No. 1 Tahun 2018 untuk PKH dan Permensos No. 20 Tahun 2019 untuk BPNT. Meski memiliki pedoman yang berbeda, kedua program tersebut memiliki teknis pelaksanaan yang hampir sama, yaitu melalui tahapan pendaftaran, observasi, penginputan, dan validasi. Namun, perubahan pada tahun 2022, di mana bantuan BPNT berubah dari sembako menjadi uang tunai, membuka peluang penyalahgunaan bantuan oleh masyarakat. Penanggung jawab program PKH adalah Bapak Dian Afrizal, S.P., sedangkan untuk BPNT adalah Ibu Nurul Fajri, S.P., dengan penanggung jawab tertinggi adalah Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Bapak Armia, S.P.

Kompetensi staf dalam program PKH sudah terpenuhi melalui pelatihan dan seminar, yang memungkinkan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Namun, staf yang mengelola BPNT belum memiliki kompetensi khusus yang dibutuhkan, sehingga menghambat optimalisasi penyaluran bantuan. Hambatan lain termasuk sistem yang belum mutakhir, ketidakpahaman masyarakat dalam proses pendaftaran, dan penyalahgunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) oleh pihak desa. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait.

### 3.4 Produk

Program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa telah berhasil memenuhi kebutuhan dengan menyalurkan bantuan PKH dan BPNT kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Namun, Dinas Sosial tetap memiliki tugas tambahan untuk mengevaluasi dan memfilterisasi sistem penginputan data masyarakat miskin agar bantuan dapat tepat sasaran. Dampak positif dari pelaksanaan program ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan di Kota Langsa dari tahun 2021 hingga 2022. Meski demikian, Dinas Sosial harus terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan PKH dan BPNT agar program ini dapat lebih berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang.

### **Upaya Dinas Sosial Kota Langsa Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam optimalisasi pelaksanaan PKH dan BPNT diantaranya yaitu, (1) Melakukan pendekatan inklusif kepada masyarakat tentang pemanfaatan bantuan yang diberikan agar digunakan secara optimal. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi penerima manfaat. (2) Rencana untuk mengubah format BPNT dari bantuan tunai menjadi sembako bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. (3) Upaya dalam melakukan evaluasi terhadap sistem penginputan data masyarakat miskin dengan tujuan memastikan program-program tersebut dapat tepat sasaran dan efektif. (4) Menggunakan fasilitas pendukung program yang



tersedia saat ini sebagai langkah awal, serta komitmen untuk memperbaiki kekurangan fasilitas tersebut demi mendukung pelaksanaan program secara lebih efisien, tidak hanya merupakan tindakan pragmatis yang memastikan optimalisasi sumber daya, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat terhadap peningkatan kontinu dalam pelayanan dan efektivitas program, seiring dengan berbagai upaya perbaikan yang terus menerus dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (5) Usaha untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Langsa dalam menyediakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi para pelaksana PKH dan BPNT untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap program pengendalian kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Langsa, ditemukannya masalah utama dalam pelaksanaannya yaitu terjadinya penurunan anggaran yang cukup signifikan terhadap PKH dan BPNT, serta sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendorong pelaksanaan program tidak terpenuhi dengan baik, sehingga hal ini menentukan optimalisasi kinerja dari pelaksanaan program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa.

Kemudian di tahun 2022 bantuan pada program BPNT tidak lagi berupa sembako melainkan uang tunai yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini lah yang berpotensi penyalahgunaan bantuan yang dilakukan oleh masyarakat. Kompetensi staf pada PKH sudah terpenuhi dan dapat direalisasikan pada pelaksanaan program, hal ini dikarenakan mereka telah mengikuti beberapa pelatihan maupun seminar dalam mengembangkan integritas mereka, sedangkan untuk BPNT belum ada kompetensi khusus yang dimiliki oleh para pelaksana program, sehingga hal ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan secara efektif sesuai dengan tujuan program. Faktor yang menjadi penghambat dari PKH dan BPNT yaitu seperti sistem yang belum termutakhir, ketidakpahaman masyarakat dalam melakukan pendaftaran, serta penyalahgunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) oleh pihak desa. Maka dari itu perlu dilakukannya perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh penulis dengan mepedomani teori yang ada, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa belum optimal, masih terdapat beberapa hambatan seperti ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan, kompetensi yang tidak dimiliki para pelaksana, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih terlalu awal dalam penelitian yang dilakukan terkait evaluasi, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian yang sama kedepannya dengan persiapan yang maksimal pada lokasi serupa, terkait dengan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Langsa Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Muri Yusuf (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, And Applications*. Jossey-Bass. United States Of America
- Ali, L. & Masrich, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Tengah*. 56-71. (<https://dx.doi.org/10.34308/eqien.v4i2.48>)
- Belasari., Bustami Rahman., & Ranto. R. (2022). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Inovasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat*. (<http://dx.doi.org/10.52000/jsi.v2i2.85>)
- Agustina Dwita & Megawati Suci. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto*. Dwita Agustina Suci Megawati. 175–190. (<https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>)
- Felinda Wulandari., Yamardi., & Titin. R. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*. (<https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.206>)
- R.Retno, Indraddin, A. (2022). *Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan: Studi Di Nagari Sungai Pinang*. (<https://doi.org/10.25077/jsa.8.2.130-145.2022>)
- Yanila Hawala. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan ( Pkh ) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Balodano Kecamatan Ma ' U Kabupaten Nias*. *Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan 2022 Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Balodan*. (<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/19216>)
- UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



(2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, (2020).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), (2018).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2019).

Zulkarnaini (2023). *Aceh Peringkat 6 Provinsi Termiskin di Indonesia*. Dialeksis.com

BPS Kota Langsa. (2023). *Kota Langsa dalam Angka 2023*.

